

KEMANDIRIAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2004-2014

Samsudin

NIM : 143110021

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta

(samsamsudin24@gmail.com)

ABSTRAK

Konsep Otonomi Daerah yang dianut, memberikan konsekuensi logis dilakukannya distribusi atau pemencaran kekuasaan kepada pemerintah daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Distribusi atau pemencaran kekuasaan dilakukan melalui 3 (tiga) asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*medebewind*). Studi ini akan mengestimasi data keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal, sehingga akan mendapatkan bagaimana gambaran pengelolaan serta kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang beruaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data. Jadi selain menyajikan juga menganalisis dan mengiterprestasikan (Surahmad 2005). Berdasarkan hasil analisis untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten Kendal Tahun (2004-2014) dengan menggunakan 8 kriteria rasio keuangan menunjuka nilai rata-rata selama periode penelitian menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Kendal masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan tingkat kemandirian pemerintah kabupaten kendal masih kurang.

Kata kunci: Kemandirian Daerah, Ketergantungan Fiskal